

FAKTOR KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM LITERASI MEDIA DIGITAL DI KALANGAN MAHASISWA DKI JAKARTA

Tavida Priskila, Amni Zakarsyi Rahman, Retna Hanani
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Abstract

Students as agents of the nation should be able to use digital media to increase the productivity of economic, social, and political life. In reality, students are still involved in negative content. With Digital Media Literacy, the government hopes that students will be able to be smart in media. In the realization of Digital Media Literacy, the organizers replaced the pre-test and post-test stages with quizzes whose systems were answered voluntarily. This research uses descriptive qualitative methods. This research found that most of the implementation of Digital Media Literacy was successfully carried out according to the technical guidelines of implementation. The internal driving factors in the implementation of the program consist of the interests affected, the position of the formulator, the implementor of the program and the support of resources. While, the external driving factor lies in the implementation stage, which consists of ; power, interests, and actor strategy; characteristics of the institution; and compliance and responsiveness. An internally inhibiting factor in the implementation of the program in the preparatory stage is the desired degree of change. Meanwhile, the external inhibiting factor in the post-implementation stage of the Digital Media Literacy Program is the type of benefit generated post-implementation. The conclusion of this study is that the implementation of the Digital Media Literacy Program among DKI Jakarta students has generally been successfully implemented, driven by internal and external factors. The suggestion in this study is that the implementing party needs to carry out a post-test seriously to find out the impact of the implementation of the activity.

Key words: Government Program, Implementation, Digital Media Literacy

PENDAHULUAN

Tingginya penggunaan sosial media oleh masyarakat Indonesia untuk mengakses konten informasi dan komunikasi tidak menjamin kebijakan dan kedewasaan masyarakat Indonesia di ruang digital. Banyak masyarakat yang menyalahgunakan kebebasannya di media

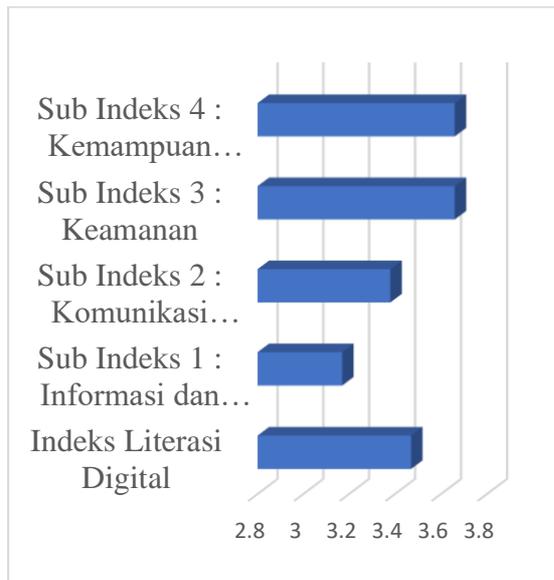
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan Program

sosial dalam mengakses informasi dan komunikasi. Survey Microsoft pada tahun 2021 menyatakan Netizen Indonesia dengan tingkat kesopanan terendah se-Asia Tenggara. Indonesia menempati urutan ke-29 dari 32 negara yang di survey (CNNIndonesia, 2021).

Literasi Digital ditengah masyarakat Indonesia untuk menuntaskan isu di ruang digital. Program literasi digital dapat



dikatakan berhasil apabila sukses membangun kesadaran masyarakat untuk menangkal konten-konten negatif secara merata. Modul program literasi digital didasarkan pada empat pilar yakni, keamanan digital, keterampilan digital, etika digital, dan budaya digital.



Gambar 1. Indeks Literasi Media Digital Tahun 2020

Sumber : *(Laporan Kata Data Insight Center dan Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020)*. Telah diolah Kembali.

Berdasarkan data hasil survey literasi digital Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Katadata di Indonesia Tahun 2020 menyatakan bahwa literasi digital masyarakat digital di DKI Jakarta masih belum mencapai tingkat baik. Hasil survey memaparkan mengenai indeks literasi digital Indonesia sebesar 3,47 dari

skala 4, dengan skala 3,43 pada wilayah Barat yaitu salah satunya DKI Jakarta, 3,57 pada wilayah tengah, dan 3,44 pada wilayah Timur.

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menangani kasus penyebaran konten negatif di situs internet sejumlah 1,5 Juta terhitung sejak Agustus 2018 sampai 30 November 2021. Konten negatif merupakan konten pornografi, konten perjudian, hoaks, penipuan, dan segala konten kriminal di media digital. Pornografi merupakan konten negatif yang paling banyak ditemukan dengan jumlah 1,06 juta konten. Konten pornografi seringkali dijalankan sebagai bisnis oleh mahasiswa. Pada tahun 2019, Polres Metro Jakarta Barat menemukan empat mahasiswa terlibat dalam bisnis pornografi di media sosial twitter yang telah mencapai 700 pelanggan, dimana dalam bisnis ini mahasiswa memperkerjakan anak-anak dibawah umur sebagai pemeran (Kompas.com, 2020).

Literasi media digital dalam kalangan mahasiswa akan mendorong proses dan strategi mahasiswa di ruang digital untuk berpikir kritis dan mampu memiliki etis yang baik. Mahasiswa dapat dikatakan cerdas menggunakan media sosial apabila dirinya aman dan mendapatkan manfaat positif. Implementasi Program Literasi

Digital di tengah era pandemi COVID-19 ini tentu mengalami tantangan.

Mekanisme penyelenggaraan Program Literasi Digital saat ini dilaksanakan penuh secara online, sehingga tidak bisa mengontrol apakah peserta betul-betul memperhatikan dan menguasai materi yang disampaikan atau tidak. Dalam tahap penyelenggaraan kegiatan, materi kegiatan yang dilaksanakan seharusnya mencakup empat modul dalam pilar literasi digital, yakni *digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety*. Pelaksanaan kegiatan literasi digital seharusnya mampu membangun pemahaman peserta mengenai seluruh pilar literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ketentuan penyelenggaraan Program Literasi Digital, penyelenggara seharusnya melaksanakan pre-test dan post-test dalam tahap pasca-pelaksanaan untuk mengetahui apakah seluruh peserta yang mengikuti pelatihan literasi digital sudah mampu memahami materi yang disampaikan. Namun kenyataannya, dalam realisasi Program Literasi Digital, penyelenggara mengganti tahap *pre-test* dan *post-test* dengan *quiz* yang sistemnya dijawab secara sukarela.

Berangkat dari paparan permasalahan pada paragraf-paragraf sebelumnya, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Program Literasi

Media Digital di kalangan mahasiswa DKI Jakarta dan apa saja faktor pendorong serta penghambat implementasi Program Literasi Media Digital di kalangan mahasiswa DKI Jakarta.

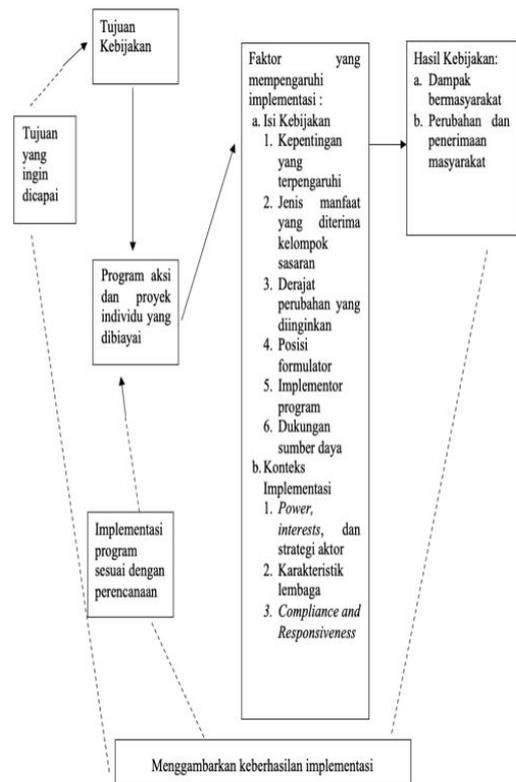
KAJIAN TEORI

Implementasi kebijakan merupakan proses umum tindakan administratif pada tingkat tertentu (Grindle, 1980). Dalam implementasi kebijakan, terdapat dua faktor yang mendorong keberhasilan implementasi yakni isi kebijakan (*content of police*) dan konteks implementasinya (*context of police*) (Grindle, 1980).

Content of police mencakup kepentingan yang terpengaruhi, jenis manfaat yang diterima kelompok sasaran, derajat perubahan yang diinginkan, posisi formulator, implementor program, serta dukungan sumber daya. Aspek kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan berarti semakin banyak kepentingan berbeda dalam sebuah kebijakan maka akan lebih sulit kebijakan itu diimplementasikan dibandingkan ketika kepentingan yang tersangkut lebih sedikit. Lalu, jenis manfaat yang dihasilkan adalah manfaat sebuah kebijakan tidaklah hanya secara formalitas atau simbolis, namun juga bermanfaat bagi banyak pelaku. Berikutnya, derajat perubahan yang diinginkan berarti sejauh mana perubahan diinginkan dalam sebuah kebijakan, jangka waktu perubahan, dan

jenis perubahan yang diinginkan. Derajat perubahan akan mempengaruhi manfaat kebijakan. Selanjutnya, aspek posisi formulator merupakan bagaimana pusat kekuasaan pembuat kebijakan mampu mempengaruhi keberhasilan implementasi. Berikutnya, aspek implementor program adalah bagaimana kerincian pelaksana dalam mensukseskan implementasi kebijakan. Untuk dukungan sumber daya yang dimaksud adalah bagaimana sumber daya yang digunakan mampu menentukan keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan.

Sementara, *context of police* mencakup; *power, interests*, serta strategi aktor yang terlibat; karakteristik lembaga, serta *compliance and responsiveness*. Power, interests, serta strategi aktor yang terlibat mampu mendorong keberhasilan pelaksanaan kebijakan ketika banyak aktor yang terlibat dengan tujuan satu kepentingan. Aspek karakteristik lembaga mampu mendorong keberhasilan implementasi, karena hasil implementasi merupakan hasil dari adanya interaksi lembaga. Untuk aspek *compliance and responsiveness*, mampu mendorong keberhasilan implementasi ketika pelaksana taat dalam melaksanakan program dan sigap dalam merespon masyarakat.



Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan Grindle

Sumber: Samodra wibawa (2004)

Pada gambar diatas dijelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan digambarkan dengan apakah proses implementasi program tersebut telah berjalan sesuai dengan perencanaan. Tujuan kebijakan akan tercapai apabila implementasi program tersebut berjalan sesuai dengan standar ketentuan pelaksanaan atau prosedur pelaksanaan. Tujuan kebijakan kemudian diwujudkan dan diberikan biaya kedalam program aksi ataupun program individu. Keberhasilan implementasi program akan didukung oleh

dua faktor yakni isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan hasil kebijakan akan diukur melalui dampak dan perubahan yang dihasilkan oleh masyarakat dari hasil implementasi kebijakan.

Literasi digital merupakan kesadaran, sifat, serta kemampuan individu dalam

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku pembuat dan pengarah Program Literasi Media Digital, serta informan mahasiswa yang sudah mendapatkan pelatihan literasi digital sebagai target dari Program Literasi Media Digital. Peneliti memilih teknik *purposive sampling* dalam menentukan subjek penelitian, yang dianggap paling paham akan realisasi program ini. Jenis data informan sebagai subjek dalam penelitian ini diperoleh ketika peneliti melakukan wawancara dengan informan, dimana data yang dihasilkan berupa lisan. Sumber data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai pembuat sekaligus lembaga yang mengkoordinasikan realisasi program dan beberapa mahasiswa DKI Jakarta selaku target dari program, yang telah memahami

menggunakan alat dan fasilitas digital secara tepat untuk mengidentifikasi, mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, berkomunikasi, dalam konteks kehidupan yang mungkin menciptakan tindakan sosial yang konstruktif serta merenungkan rangkaian proses (Martin dalam Kohlay, 2011).

dan pernah mengikuti program literasi media digital. Sementara, sumber sekunder diperoleh peneliti dengan cara membaca dan melakukan review terhadap penelitian terdahulu, Peraturan Pemerintah, artikel, dan makalah ilmiah. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa triangulasi data yaitu observasi partisipatif, wawancara dan studi dokumentasi dalam memperoleh data terkait penelitian yang dilakukan. Observasi partisipatif dalam penelitian ini dilakukan dengan berpartisipasi langsung pada Webinar dengan judul Sadar Rekam Jejak Digital pada bulan Mei 2022. Wawancara dalam penelitian ini diperoleh dari kegiatan tempat atau lokasi dimana data tersebut diperoleh atau diperoleh secara tidak langsung yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Wawancara dilakukan secara *online*. Seluruh narasumber merupakan narasumber terpercaya. Wawancara dilakukan sejak bulan April 2022 hingga Mei 2022. Sementara, Studi dokumentasi

dalam penelitian ini dalam bentuk tulisan seperti; catatan harian, biografi, peraturan, kebijakan; gambar, ataupun karya-karya. Dalam penelitian ini, model analisis yang digunakan adalah *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), *Conclusion Drawing*. Dalam memastikan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Literasi Media Digital di Kalangan Mahasiswa DKI Jakarta

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan, pelaksana pertama-tama berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan dinas/mitra/komunitas terkait lainnya di tingkat kabupaten/kota terkait *planning* kegiatan dan target peserta serta melakukan *technical meeting* sebagai rapat persiapan dengan para pihak terkait pada H-3 sebelum kegiatan. Rapat koordinasi dilaksanakan demi memastikan tidak adanya miskomunikasi antara pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan memastikan pelaksanaan sesuai dengan prosedur. Berikutnya, mitra pelaksana menghubungi dua orang narasumber yang memiliki kompetensi empat pilar literasi digital, yakni *digital skills*, *digital ethics*, *digital safety*, and *digital culture* di tingkat nasional untuk pelaksanaan di DKI Jakarta. Selanjutnya, pelaksana Program Literasi

kualitas dalam penelitian ini, peneliti menguji kredibilitas data dengan teknik triangulasi. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan secara teknik yakni mengecek hasil observasi dengan wawancara dan studi dokumentasi

Media Digital menghubungi serta menyediakan satu orang *key opinion leader* (KOL) dengan minimum pengikut di akun sosial media 10.000 followers untuk lebih menarik atensi publik. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, narasumber sebagai pembicara dalam webinar dan juga moderator, memang sudah kompeten di bidangnya. Namun, ada beberapa *key opinion leaders* yang mengisi pelaksanaan Program Literasi Media Digital, yang citra nya kurang positif di pandangan masyarakat. Salah satu *key opinion leaders* dalam kegiatan Literasi Media Digital pernah memiliki kasus pidana sehingga citra positif nya sempat tercoreng di mata masyarakat atas penyalahgunaan narkoba jenis golongan I bagi diri sendiri dan dijatuhkan pidana selama tujuh bulan. Jefri melanggar Pasal 111 ayat 1 dan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini tentu tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Program Literasi Media Digital bahwa *key*

opinion leader yang dipilih adalah mereka yang memiliki minimum 10.000 pengikut di media sosial Instagram atau Twitter, dengan citra positif di masyarakat dan tidak pernah tersangkut kasus pidana. Hal ini merupakan kelemahan dalam tahap persiapan pelaksanaan Program Literasi Media Digital. Kemudian, pelaksana mengusulkan, menghubungi, dan menyiapkan 1 (satu) orang moderator yang kompeten di bidang *public speaking*. Pelaksana lalu mengumpulkan data terkait narasumber, *key opinion leader* (KOL), maupun moderator. Pelaksana akan menyebarkan undangan untuk narasumber dan moderator melalui narahubung, sementara undangan pelaksanaan kepada peserta akan disebarluaskan melalui plamfet kegiatan di sosial media.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan, pelaksana melaksanakan pelatihan terkait Program Literasi Media Digital dengan berlandaskan pada empat pilar literasi media digital, yakni *digital skills*, *digital ethics*, *digital culture*, serta *digital safety*. Pelaksanaan event terkait literasi media digital terdiri dari berbagai tema yang sangat bervariasi. Dalam pelaksanaan kegiatan online berupa webinar ataupun *talkshow*, peserta perlu mendaftarkan diri terlebih dahulu di link

yang telah disediakan dalam website event.literasidigital.id, kemudian setelah melengkapi data diri dan mengisi pre-survey, peserta akan mendapatkan token sebagai kode untuk mengakses *room* di *platform* yang telah disediakan pada hari-h kegiatan. Waktu pelaksanaan literasi media digital sering dipotong oleh pihak pelaksana untuk meningkatkan kondusivitas.

Saat hari pelaksanaan, panitia pelaksana hari-h melakukan briefing untuk menghindari miskomunikasi antara moderator, narasumber, dan seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, panitia pelaksana juga memastikan seluruh sound, koneksi internet, dan keperluan untuk pelaksanaan sudah sesuai dengan ketentuan pelaksanaan. Kemudian, memastikan narasumber dan moderator telah hadir tepat waktu serta jumlah peserta telah sesuai dengan yang didaftarkan di link registrasi.

Pada hari pelaksanaan, moderator yang telah ditentukan sesuai dengan kriteria moderator event, akan memimpin keberjalanan acara dari awal hingga akhir. Moderator akan mengawali acara dengan doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian menyampaikan tata tertib selama keberjalanan acara, lalu dilanjutkan dengan sambutan pembicara utama, dan sebelum mengakhiri acara,

moderator akan menyambungkan diskusi tanya jawab antara peserta dengan speaker yang telah dipilih sesuai dengan tema acara, serta mengakhiri acara dengan kesimpulan dan memastikan peserta mengisi survey setelah kegiatan. Kemudian, moderator membuat notulensi pemaparan narasumber dan transkrip yang diketik untuk melaporkan tahap pelaksanaan. Setelah acara selesai, maka peserta akan mendapatkan sertifikat melalui email yang dikirimkan oleh panitia.

3. Tahap Pasca-Pelaksanaan

Dalam tahap pasca-pelaksanaan, pelaksana telah mengadakan tahap pasca-pelaksanaan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Program Literasi Media Digital. Namun, post-test yang diadakan hanyalah dalam bentuk survey. Pelaksana juga telah mengirimkan sertifikat elektronik kepada narasumber dan moderator sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, lalu membayar narasumber dan moderator, serta memberikan gimmick pada peserta yang aktif selama kegiatan webinar.

B. Faktor Internal dan Eksternal

Faktor Internal

1. Tahap Persiapan

- a. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan

Dalam Program Literasi Media Digital, desain program ini sejak awal

murni dirancangkan untuk kepentingan masyarakat di Indonesia. Seluruh pihak saling bersinergi satu sama lain untuk mengimplementasikan Program Literasi Media Digital ini. Sedikitnya kepentingan pihak yang tersangkut dalam Program Literasi Media Digital meminimalisir terjadinya konflik kepentingan dalam implementasi Program Literasi Media Digital dan mengubah potensi konflik tersebut menjadi potensi mitra yang saling menguntungkan. Sejah ini, pihak yang terlibat dalam implementasi program ini selalu mendukung satu sama lain, sesuai dengan arahan dari KemenKominfo sebagai koordinator pusat dan standar ketentuan pelaksana yang telah ditetapkan.

- b. Derajat perubahan yang diinginkan

Dalam Program Literasi Media Digital, manfaat yang dirasakan oleh peserta hanyalah sejauh pada dasar dari Literasi Media Digital. *Knowledge* yang didapatkan hanyalah secara general, bukan pengetahuan dan wawasan yang mendalam. Secara jangka pendek, manfaat yang diterima oleh peserta sudah sesuai dengan yang ditargetkan Kementerian Kominfo untuk jangka pendek. Sejah ini, perubahan peserta sebelum dan setelah mengikuti pelatihan

Program Literasi Media Digital belum mencapai apa yang diinginkan Kementerian Kominfo dalam jangka panjang, yaitu perubahan *behavioural*. Perubahan dalam waktu singkat tidaklah sulit, namun perubahan untuk jangka panjang yang sulit. Dalam jangka panjang, bagaimana masyarakat mampu tetap menanamkan *mindset* terliterasi akan digital. Hal ini merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Literasi Media Digital.

c. Posisi formulator

Dalam Program Literasi Media Digital, kedudukan pembuat program berada di jajaran Pemerintah Pusat, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika atas dasar arahan Presiden Joko Widodo selaku pemimpin negara. Kekuasaan dalam program ini terletak pada Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Kominfo yang telah diamanahkan oleh Presiden untuk mempercepat transformasi digital. Kementerian Kominfo sebagai Pemerintah Pusat memiliki kekuasaan untuk mengarahkan Kementerian/Lembaga lainnya, Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Literasi Digital untuk bersinergi

mensukseskan implementasi Program Literasi Media Digital. Seluruh koordinasi dipusatkan kepada Kementerian Kominfo, dimana pelaksana melaksanakan Program Literasi Media Digital sesuai dengan koordinasi dan standar ketentuan pelaksanaan yang telah disediakan oleh Kementerian Kominfo. Hal ini mendorong keberhasilan dalam pelaksanaan Program Literasi Media Digital.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Implementor program

Implementor program menyangkut apakah pelaksana Program Literasi Digital telah memiliki keahlian, dedikasi, serta kemampuan yang tinggi sesuai dengan standar ketentuan yang ditentukan (Grindle,1994). Sejauh ini, pelaksanaan Program Literasi Media Digital sudah sesuai dengann standar pelaksanaan yang disediakan oleh Kementerian Kominfo sesuai dengan tema agenda pelaksanaan. Mulai dari pihak yang terlibat, narasumber atau pemateri dalam event, hingga keahlian pelaksana dalam melaksanakan Program Literasi Media Digital, semua sudah memiliki *skill-set* yang dibutuhkan. Seluruh pihak bersinergi dalam mensukseskan pelaksanaan Program Literasi Media Digital. Seluruh pihak

yang terlibat sebagai mitra dalam pelaksanaan Program Literasi Media Digital, khususnya di kalangan mahasiswa sebagai bagian dari anak muda terlihat antusias dan konsisten dalam pelaksanaan. Dalam sosial media Siberkreasi, Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada, salah satu dari 120 mitra pelaksana Program Literasi Media Digital, terlihat rutinitas mereka dalam meng-update event-event mengenai literasi digital yang disediakan dalam bentuk variatif. Update terkait event ataupun konten Program Literasi Media digital dilakukan oleh pelaksana lebih dari empat kali dalam satu minggu. Seluruh mitra pelaksana bergerak sejalan dengan Kementerian Kominfo dalam melaksanakan Program Literasi Media Digital. Selain konsistensi, terlihat antusiasme mitra pelaksana dari terus bervariasi nya event yang disediakan, seperti Instagram live, Instagram reels, kemudian melalui post di sosial media yang menyampaikan pesan edukatif mengenai empat pilar literasi media digital.

b. Dukungan sumber daya

Bentuk sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan Program Literasi Media Digital merupakan sumber daya manusia dan sumber daya

non-manusia, yaitu sumber daya finansial dan sumber daya teknologi. Sumber daya finansial berasal dari APBN Negara Indonesia yang telah diatur dalam peraturan Dirjen Perbendaharaan, dimana Kementerian Kominfo mengelola sumber daya finansial berdasarkan pada peraturan tersebut. Sejauh ini, sumber daya finansial yang dialokasikan sudah cukup untuk mencapai target implementasi yang diinginkan. Selain sumber daya finansial, sumber daya lain dalam pelaksanaan Program Literasi Media Digital merupakan sumber daya teknologi selaku sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program. Sumber daya teknologi yang disediakan oleh pelaksana berupa link dan keamanan platform pelaksanaan event berupa zoom, Instagram, dan YouTube.

Bentuk sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program Literasi Media Digital tentu memegang peranan penting dalam mensukseskan implementasi Program Literasi media Digital. Apabila jumlah sumber daya manusia tidak seimbang dengan target program yang ingin dilaksanakan, maka akan menghambat keberhasilan pelaksanaan Program Literasi Media Digital. Dalam pelaksanaan Program Literasi Media Digital, jumlah sumber

daya manusia sudah memadai, yakni sejumlah 45 orang dari Kementerian Kominfo, ditambah dengan bantuan 120 mitra pelaksana. Disamping jumlah sumber daya manusia yang memadai, keberhasilan pelaksanaan Program Literasi Media Digital ini juga didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang terlibat. Sumber daya manusia yang terlibat merupakan mereka yang sudah kompeten di bidangnya masing-masing, sehingga menguasai *knowledge* yang luas akan tema terkait. Profil pemateri dan pihak terlibat dalam *event* tersebut juga merupakan sosok yang memiliki integritas personal dalam kehidupan pribadinya sehari-hari.

3. Tahap Pasca-Pelaksanaan

Belum ditemukan faktor pendorong ataupun penghambat secara internal dalam pelaksanaan Program Literasi Media Digital di Kalangan Mahasiswa DKI Jakarta.

Faktor Eksternal

1. Tahap Persiapan

Belum ditemukan faktor pendorong ataupun penghambat secara internal dalam pelaksanaan Program Literasi Media Digital di Kalangan Mahasiswa DKI Jakarta.

2. Tahap Pelaksanaan

a. *Power, interests*, dan strategi aktor

Adanya *power, interests*, serta keterlibatan aktor dari berbagai level baik pemerintah maupun lembaga non-pemerintah dalam implementasi sebuah program pemerintah yang memiliki strategi serta kebutuhannya masing-masing akan mendorong keberhasilan implementasi sebuah program pemerintah (Grindle, 1994). Dalam pelaksanaan Program Literasi Media Digital, terlibat aktor dari berbagai level pemerintah maupun non-pemerintah, mulai dari Pemerintah Pusat selaku formulator dan koordinator pelaksanaan, Kementerian/Lembaga lainnya, Pemerintah Daerah, pihak swasta, hingga *Civil Society Organization* (CSO). Tanpa adanya keterlibatan dan kolaborasi dengan aktor lainnya, Kementerian Kominfo tidak akan bisa *handle* pelaksanaan program ini sendiri, mengingat program ini merupakan program prioritas nasional sehingga harus merata dilaksanakan pada 514 Kota/Kabupaten di Indonesia.

b. Karakteristik lembaga

Interaksi antara Kementerian Kominfo dengan Kementerian/Lembaga lainnya perlu dilakukan dalam mengintegrasikan tindakan realisasi Program Literasi Media Digital dan menciptakan saling menghargai antar pihak yang terlibat. Interaksi lembaga yang terjadi merupakan interaksi

langsung (direct contact), dimana Kementerian Kominfo sebagai koordinator akan mengarahkan langsung kepada Kementerian/Lembaga lainnya melalui PIC masing-masing Kementerian/Lembaga. Koordinasi dalam pelaksanaan Program Literasi Media Digital dilaksanakan secara *top-down*.

c. Compliance and responsiveness

Dalam pelaksanaan Program Literasi Media Digital, pelaksana melaksanakan seluruh program sesuai dengan standar ketentuan pelaksanaan dan mampu merespon kebutuhan mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari tema-tema event yang disasarkan untuk anak muda, lebih sering mengambil pilar *digital safety* dan *digital ethics*.

Dalam akun sosial media Siberkreasi dan CFDS UGM selaku salah satu mitra dalam pelaksanaan Program Literasi Media Digital, menunjukkan kedua akun ini terus secara rutin mengupdate mengenai event dan konten-konten literasi media digital. Hal ini membuktikan bahwa mitra selalu sejalan dengan arahan dari Kementerian Kominfo selaku koordinator pelaksanaan, mengenai event-event.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, dalam hal responsivitas, Kementerian Kominfo dan segenap pihak pelaksana telah memaksimalkan

untuk dapat merespon kebutuhan masyarakat terkait literasi media digital. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan menyediakan layanan hubungan untuk menghubungi bila ada permasalahan terkait event literasi digital serta layanan hubungan terkait kendala download sertifikat. Hal ini dapat dilihat pada gambar diatas. Gambar diatas merupakan bukti dari usaha yang dilakukan Kementerian Kominfo untuk memastikan bahwa netizen nya merasa nyaman dan puas terhadap event yang diselenggarakan terkait Program Literasi Media Digital. Hal ini juga sudah sesuai dengan standar pelaksanaan dimana panitia wajib mengirimkan *e-certificate* untuk narasumber, moderator, dan peserta pada tahap pasca-pelaksanaan. Selain memastikan terdapat layanan pengaduan, Kementerian Kominfo sebelum melaksanakan program juga melakukan riset dan survey terdahulu kepada target, sehingga materi dan konten pelatihan Program Literasi Media Digital yang dilaksanakan mampu sesuai dengan apa yang dibutuhkan kalangan mahasiswa.

3. Tahap Pasca-Pelaksanaan

Dalam tahap pasca-pelaksanaan Program Literasi Media Digital, terdapat faktor penghambat eksternal, yaitu jenis

manfaat yang diterima. Dalam Program Literasi Media Digital, khususnya bagi kalangan mahasiswa di DKI Jakarta, manfaat akan betul-betul dirasakan oleh peserta apabila program ini dilaksanakan secara ideal. Manfaat yang diperoleh oleh mahasiswa sebagai peserta pelatihan, bukan hanya berupa sertifikat ataupun edukasi dan *knowledge*, tetapi juga *networking* dengan orang-orang baru, serta uang tunai apabila beruntung. Hal inilah yang menarik bagi mahasiswa untuk mengikuti event-event Literasi Media Digital. Berdasarkan pada temuan lapangan yang telah dipaparkan pada paragraf-paragraf diatas, penulis menganalisis bahwa dalam pelaksanaan Program Literasi Media Digital, mahasiswa sudah merasakan *knowledge* mengenai apa dan bagaimana itu Literasi Media Digital, namun belum ada pernyataan dari mereka bagaimana mereka sudah sadar akan pentingnya peran mereka dalam meningkatkan awareness masyarakat lain terkait Literasi Media Digital. Manfaat yang diperoleh peserta tidak hanya sebatas pada manfaat formal dan simbolis, yakni *knowledge* dan sertifikat, tetapi juga *networking*.

Pelaksanaan Program Literasi Media Digital secara online tidak mampu menjamin apakah peserta betul-betul mendapatkan *knowledge* yang komperhensif mengenai Program Literasi Media Digital atau hanya memahami dasar dari Program Literasi Media Digital, mengingat tidak ada yang bisa memastikan apa yang peserta lakukan dibalik layar perangkat digital, apakah betul-betul mengikuti atau sekedar masuk di room kegiatan. Disamping itu, hanya dengan mengikuti satu kali event atau pelatihan, kecil kemungkinan peserta untuk mendapatkan segala jenis materi. Selain itu dalam Implementasi pelatihan Program Literasi Media Digital secara online, peserta akan lebih susah berkenalan satu sama lain karena keterbatasan dalam platform dan lebih individualitas dibandingkan ketika pelatihan dilaksanakan secara offline, dimana peserta lebih mudah dan bebas berkenalan dengan peserta lainnya yang mengikuti pelatihan hari itu. Namun, meskipun manfaat yang diperoleh belum sempurna, hasil dari Implementasi Program Literasi Media Digital khususnya di kalangan mahasiswa Provinsi DKI Jakarta ini sudah mulai terlihat.

KESIMPULAN

Program Literasi Media Digital di kalangan mahasiswa DKI Jakarta dilaksanakan secara *top-down* berdasarkan Kerangka Acuan Kerja Paket I Siberkreasi Jawa Barat. Implementasi Program Literasi Media Digital di kalangan mahasiswa DKI Jakarta sebagian besar dapat disimpulkan telah berhasil, mengingat secara sebagian besar, keseluruhan tahap pelaksanaan Program Literasi Media Digital sudah sesuai dengan standar ketentuan pelaksanaan. Pelaksanaan Program Literasi Media Digital telah berhasil mencapai keberhasilan pada tiga dari empat modul pilar Literasi Digital. Pada *pilar digital skills* dan *digital ethics* telah mencapai indeks baik, serta *digital culture* telah mencapai indeks sangat baik. Namun, pada pilar *digital safety*, pilar ini masih memiliki indeks terendah dan belum berhasil mencapai indeks baik.

Faktor pendorong internal dalam pelaksanaan Program Literasi Media Digital terdiri dari kepentingan yang terpengaruh, posisi formulator, implementor program dan dukungan sumber daya. Sedikitnya kepentingan yang terpengaruh dalam pelaksanaan Program Literasi Media Digital meminimalisir potensi konflik kepentingan dan mengubah potensi konflik menjadi mitra yang sinergis

dalam pelaksanaannya. Hal ini mendorong kelancaran koordinasi dan keseluruhan perancangan konsep kegiatan dalam tahap persiapan pelaksanaan Program Literasi Media Digital. Disamping itu, tingginya posisi pembuat kebijakan di tingkat pusat akan mempermudah keseluruhan koordinasi dalam persiapan Program Literasi Media Digital secara serentak. Berikutnya, implementor program dan dukungan sumber daya turut mendorong keberhasilan tahap pelaksanaan Program Literasi Media. Dedikasi dan keahlian yang dimiliki implementor, serta dukungan sumber daya manusia maupun non-manusia yang telah disediakan oleh mitra pelaksana ataupun Kementerian Kominfo, mendorong kesuksesan tahap pelaksanaan dalam mengelola pelatihan Program Literasi Media Digital. Sementara, faktor pendorong eksternal terletak dalam tahap pelaksanaan, yang terdiri dari ; *power, interests*, dan strategi aktor; karakteristik lembaga; serta *compliance and responsiveness*. *Power, interests*, dan keterlibatan aktor penting dalam mendukung pelaksanaan program ini, mengingat Kementerian Kominfo tidak mampu untuk melaksanakan program ini secara nasional sendirian, sehingga perlu adanya dukungan dari aktor dan pihak yang terlibat dalam kepentingan Program Literasi Media

Digital. Disamping itu, adanya interaksi yang kuat dan kolaborasi antar mitra pelaksana dengan Kementerian Kominfo dan seluruh jajaran pemerintah, memperkuat keberhasilan pelaksanaan Program Literasi Media Digital di kalangan mahasiswa DKI Jakarta. Selain itu, ketaatan dan kepatuhan pelaksana serta ketanggapan dalam merespon kebutuhan peserta turut mendukung keberhasilan tahap pelaksanaan. Ketaatan dan kepatuhan pelaksana dalam melaksanakan Program Literasi Media Digital sesuai dengan aturan ketentuan pelaksanaan mendorong kesuksesan pelaksanaan program karena program berjalan sesuai dengan yang telah dirancang. Sementara, ketanggapan pelaksana dalam menyediakan layanan aduan permasalahan terhadap peserta, mendorong kesuksesan pelaksanaan karena peserta betul-betul merasakan kebutuhannya terpenuhi dan mendapatkan manfaat dari kegiatan Literasi Media Digital.

Faktor penghambat secara internal dalam pelaksanaan Program Literasi Media Digital terletak dalam tahap persiapan, yaitu derajat perubahan yang diinginkan. Derajat perubahan yang diinginkan oleh formulator dalam merancang Program Literasi Media Digital adalah berupa perubahan

perilaku, dimana perubahan perilaku memerlukan jangka panjang, dan tidak ada yang bisa menjamin perubahan sifat selain individu itu sendiri. Sementara, faktor penghambat secara eksternal terletak dalam tahap pasca-pelaksanaan Program Literasi Media Digital, yaitu jenis manfaat yang dihasilkan pasca-pelaksanaan. Jenis manfaat yang diterima oleh peserta pelatihan online hanyalah terbatas pada jenis manfaat simbolis, berupa sertifikat ataupun *gimmick* bagi yang beruntung. Hal ini tentu menghambat keberhasilan tahap pasca-pelaksanaan, karena keberhasilan implementasi sebuah program adalah ketika program tersebut tidak hanya menghasilkan manfaat simbolis, tetapi terdapat jenis manfaat lainnya (Grindle, 1980).

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam tahap persiapan, pelaksana perlu melakukan *background check* terhadap *Key Opinion Leaders* (KOL) yang akan mengisi event Literasi Media Digital, untuk memastikan bahwa kriteria KOL tersebut telah sesuai dengan kriteria dalam Kerangka Acuan Kerja yang telah disediakan. KOL yang disediakan perlu dipertimbangkan sesuai kompetensinya,

- tidak hanya sekedar dari popularitas di media sosial.
- 2) Dalam tahap pelaksanaan, pelaksana perlu mendiskusikan waktu pelaksanaan Webinar dengan seluruh mitra pelaksana dalam meninjau kembali efisiensi penyelenggaraan Webinar.
 - 3) Dalam tahap pasca-pelaksanaan, pelaksana Program Literasi Media Digital perlu melakukan *post-test* secara serius, tidak sekedar survey dalam tahap pasca-pelaksanaan Program Literasi Media Digital untuk memastikan apakah peserta pelatihan betul-betul mendapatkan manfaat dan tereduksi melalui pelatihan tersebut.
 - 4) Dalam mengatasi penghambat pelaksanaan Program Literasi Media Digital, pemerintah perlu merangkai rencana kegiatan dalam memastikan tercapainya tujuan jangka panjang yaitu terjadinya perubahan perilaku jangka panjang dalam literasi media digital serta memastikan bahwa manfaat yang diperoleh peserta pelatihan bukan hanya manfaat simbolis, misalnya dengan menyediakan *breakout room* dalam setiap pelaksanaan Webinar, sehingga peserta bisa mengenal dan berdiskusi satu sama lain.

REFERENSI

- Al-Qallaf, C. L., & Al-Mutairi, A. S. R. (2016). Digital literacy and digital content supports learning: The impact of blogs on teaching English as a foreign language. *Electronic Library*, 34(3), 522–547. <https://doi.org/10.1108/EL-05-2015-0076>.
- Dani, D., Wan, G., & Henning, J. E. (2010). A case for media literacy in the context of socioscientific issues. *New Horizons in Education*, 58(3), 85.
- Erwan, A. P., & Dyath, R. S. (2018). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK* (Issue September). www.gavamedia.net
- Knaus, T., & Knaus, T. (2020). *Technology criticism and data literacy: The case for an augmented understanding of media literacy Ludwigsburg University of Education & Centre for Educational*. 12(3), 6–16.
- Leaning, M. (2019). *An Approach to Digital Literacy through the Integration of Media and*. 7(2), 4–13. <https://doi.org/10.17645/mac.v7i2.1931>
- Liansari, V., & Nuroh, E. Z. (2018). Realitas Penerapan Literasi Digital bagi Mahasiswa FKIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. *Proceedings of The ICECRS*, 1(3), 241–252. <https://doi.org/10.21070/picecrs.v1i3.1397>
- Perencanaan, T., & Evaluasi, I. (2020). *KEBIJAKAN PUBLIK Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi* (1st ed.). Brilliant.
- Petranová, D., Hossová, M., & Velický, P. (2017). Current development trends of media literacy in European Union countries. *Communication Today*, 8(1), 52–64.
- Pratiwi, A., & Asyarotin, E. N. K. (2019). Implementasi literasi budaya dan kewargaan sebagai solusi disinformasi pada generasi millennial di Indonesia. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 7(1), 65–80.

- <https://doi.org/10.24198/jkip.v7i1.20066>
- Restianty, A. (2018). Literasi Digital, Sebuah Tantangan Baru Dalam Literasi Media. *Gunahumas, 1*(1), 72–87.
<https://doi.org/10.17509/ghm.v1i1.28380>
- Saifulloh, A. I., & Irfan, S. (2021). *Implementasi Gerakan Literasi Digital Di Era Berkelimpahan Informasi Bagi Pendidikan Tinggi. 4*(2), 182–192.
- Sugiyono. (2018). Prof. Dr. Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. In *Prof. Dr. Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.*
- VELICKÝ, D. P. – M. H. – P. (n.d.). *Trends of Media Literacy in European.*
- Asean ICT Masterplan 2020, Strategic Thrust ke-5 tentang Human Capital Development.*
- Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024.
- Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Visi Misi Presiden Republik Indonesia tentang *Indonesia Toward Digital Nation 2035*, dengan menciptakan dan mengembangkan *digital talent skill* masyarakat Indonesia.